



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XLI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN SUNGAI BEDUK
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI BEDUK TAHUN 2025





KECAMATAN SUNGAI BEDUK



PEMERINTAH KOTA BATAM

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN SUNGAI BEDUK 2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Mahan Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Beduk Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman.

Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 01 Juli 2025



CAMAT SUNGAI BEDUK

DWIKI SEPTIAWAN, S.IP., M.Si
NIP. 19870926 200701 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____ 2

Daftar Isi _____ 3

Daftar Tabel _____ 4

BAB I PENDAHULUAN _____ 5

 1.1 Latar Belakang _____ 5

 1.2 Landasan Hukum _____ 5

 1.3 Maksud dan Tujuan _____ 8

 1.4 Sistematika Penulisan _____ 8

BAB II _____

HASIL EVALUASI RENJA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN I TAHUN 2025 _____ 10

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah _____ 10

 2.2. Analis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Beduk _____ 30

 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah _____ 30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH _____ 34

BAB IV PENUTUP _____ 77

 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Renja _____ 77

 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan _____ 78

 4.3 Rencana Tindak Lanjut _____ 79

LAMPIRAN :

 - SK Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk TA. 2025;

 - Form E.70 (Permendagri 86/2017);

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam 12

Tabel 3.1 Rincian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam
Tahun 202535

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Nomor 2025 maka Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hokum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); *bagi perangkat daerah yang memiliki SPM*
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
 15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di

- Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1382);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1603);
 18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam
 19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 yaitu :

- 1) Penyusunan terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, terdapat pada:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja program “Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 25.00 %
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Indikator kinerja program “Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah', perkiraan tingkat capaian sampai dengan berjalan 2025 adalah 25%
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 25 %
- Program Pengelolaan Persampahan “Cakupan Pengelolaan Sampah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 25.00 %
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program “Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah 100 %

2.1.2 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW II, III dan TW IV.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2025 yang melebihi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena masih ada Pelaksanaan kinerja yang dilakukan di TW II, TW III dan TW IV.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Beduk

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100
2.11.11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan sampah yang tidak tuntas	100 %	25 %	25 %
	2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah	100 %	25 %	25 %
	2.01.0 007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesa akhir	2 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.01.0 012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	13728 Ton	13728 Ton	13728 Ton
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25 %	25 %
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	25 %	25 %
	2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan

	2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	3 Paket	3 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rpaat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
	2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	21 Unit	3 Unit	3 Unit
	2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	0 Unit	0 Unit
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25 %	25 %

	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
	2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	1 Unit	3 Unit	3 Unit
	2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	75 Unit	31 Unit	31 Unit
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%
	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
	2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan

7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	1. 10% ; 2. 100%	1. 0.5% ; 2. 25%	1. 0.5% ; 2. 25%
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100%	25%	25%
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
7.01.05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	25 %	25 %
	2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	25 %	25 %
	2.01.00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dab ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan undang-undang dasar Negara republic Indonesiia tahun 1945, pelestarian	500 Orang	0 Orang	0 Orang

		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republic indonesia			
	2.01.00 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama , ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local regional dan nasional	1350 Orang	1350 Orang	1350 Orang
	2.01.00 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Mangsang	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25 %	25 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	25 %	25 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	4 Paket	4 paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	3 Paket	3 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	4 Paket	4 Paket

	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	25 %	25 %
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	25 %	25 %
	2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan
	2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	23 Unit	21 Unit	21 Unit
	2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	50 Pokmas/Ormas	50 Pokmas/ormas	50 Pokmas/ormas
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	75 %	75 %
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	75 %	75 %

	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	100 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	100 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Tanjung Piayu	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	50 %	50 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0 Paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	5 Paket	5 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	5 Paket	3 Paket	3 Paket

	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	2 Paket	2 Paket
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %		
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	50 %	50 %
	2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan
	2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	25 Unit	24 Unit	24 Unit
	2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 Pokmas/Ormas	100 Pokmas/Ormas	100 Pokmas/Ormas
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	0 %	0 %

	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	0 %	0 %
	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Duriangkang	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	50 %	50 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0 Paket
	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	3 Paket	3 Paket

	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	3 Paket	3 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %		
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	50 %	50 %
	2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan
	2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	28 Unit	22 Unit	22 Unit
	2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 Pokmas/Ormas	100 Pokmas/Ormas	100 Pokmas/Ormas

7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kelurahan Muka Kuning	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	50 %	50 %
	2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/epenrangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	2 Paket	2 Paket

	2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	4 Paket	4 Paket
	2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket
	2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0 Paket
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	25 %	25 %
	2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	50 %	50 %
	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100 %	50 %	50 %
	2.02.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan	7 Lembaga/Kemasyarakatan
	2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit

	2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas
7.01.03		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan. 2. Persentase warga yang berdaya	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100 %	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga
	2.06.00 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini .

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikato Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persen	92	Persen	27	
2	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	Persen	100	Persen	49.00 %	
3	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang diakomidir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	Persen	50.00 %	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh perangkat daerah secara jelas dan rinci yang terjadi pada masing-masing bidang atau bagian di perangkat daerah.

Berikut Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dihadapi oleh Kecamatan Sungai Beduk:

A. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1. Pelayanan Administrasi

- Isu: Masih banyak masyarakat yang belum bisa terlayani dengan baik.
- Faktor penyebab: Prosedur yang rumit dan tidak jelas, serta kurangnya informasi yang tersedia untuk publik serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih serta belum memenuhi standar pelayanan minimal

2. Pengelolaan Data

- Isu: Kualitas data kependudukan yang tidak akurat
- Faktor penyebab: Kurangnya infrastruktur teknologi yang menunjang sistem informasi yang berkualitas serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia

B. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Infrastruktur

- Isu 1: Pembangunan infrastruktur yang masih belum merata sesuai kebutuhan masyarakat dan belum tepat sasaran
- Faktor penyebab: Keterbatasan anggaran dan pengembangan infrastruktur yang tidak berkelanjutan akibat kurangnya koordinasi dengan Perangkat RT,RW, LPM dan Masyarakat.
- Isu 2: Sebanyak 50% anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Sungai Beduk tidak dapat dilaksanakan dan dilanjutkan
- Faktor penyebab: Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 berdampak dengan dihapusnya atau di nolkan nya anggaran tenaga teknis kegiatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini

2. Pengembangan Ekonomi

- Isu: Kurangnya Inovasi pengembangan ekonomi lokal yang berteknologi
- Faktor penyebab: Sumber daya manusia yang kurang inovatif, serta dukungan dari pemerintah Kecamatan Sungai Beduk yang sangat minim akibat anggran yang terbatas

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Isu: Kualitas pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai untuk meningkatkan keterampilan Masyarakat.
- Faktor penyebab: Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 sehingga banyak komponen penunjang pelatihan yang dikurangi sehingga pelatihan menjadi tidak efektif

C. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan

- Isu: Kualitas layanan kesehatan yang belum memadai
- Faktor penyebab: Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memadai, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

2. Penanganan Masalah Sosial

- Isu: Jumlah angka kemiskinan yang masih tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang belum merata

- Faktor penyebab: Kurangnya keterampilan masyarakat sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi serta kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait

D. Bidang Trantib

1. Pengawasan dan Pengendalian

- Isu: Pengawasan dan pengendalian yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Faktor penyebab: Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait

2. Penanganan Masalah Ketertiban

- Isu: Kesadaran masyarakat yang kurang untuk menjaga ketertiban dan keamanan ditempat umum serta pengawasan yang kurang memadai oleh pihak terkait
- Faktor penyebab: kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban masih belum memadai

3. Penanganan Masalah Persampahan

- Isu 1: Pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan akibat sampah yang berserakan di lingkungan tempat tinggal masyarakat
- Faktor Penyebab: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik.
- Isu 2: Penanganan masalah sampah yang menumpuk di TPS
- Faktor Penyebab: Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan teknologi, untuk mengelola sampah dengan efektif.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja setidaknya menimbulkan beberapa permasalahan antara lain banyak kegiatan yang anggarannya mengalami penurunan sehingga menghambat tercapainya tujuan akhir dari kegiatan tersebut antara lain:
 - Kurangnya antusias warga untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan dikarenakan anggaran perjalanan dinas (paket meeting dalam kota) yang sebelumnya bernilai Rp. 110.000,00 perorang menjadi Rp. 55.000,00 sehingga menimbulkan kesenjangan dari peserta pelatihan dimana angka tersebut hanya menjadi saldo tertahan direkening karena pembayaran non tunai
 - Belum terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dikarenakan anggaran tenaga teknis di kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di nolkan/dihilangkan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan tersebut dikarenakan tidak adanya pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan teknis kegiatan tersebut.
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan PSPK karena:

- Pada perubahan perwako tersebut dihilangkannya klausul tenaga teknis yang selama ini merupakan bagian penting dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pada perubahan perwako tersebut tanggungjawab perencanaan diberikan sepenuhnya kepada POKMAS yang diketahui tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang pada anggarannya POKMAS hanya berhubungan dengan Material dan upah saja

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

Tabel
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target dan Pagu pada
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Beduk

No	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan						Ket		
										Target 2025		Pagu				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025		RKPD Perubahan 2025	Selisih
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	2					3	4			8	9	10	11	12	13	14
						KELURAHAN MANGSANG					35.950.413.949	34.500.108.303	32.044.253.699	-3.906.160.250		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750		
	7	01				KECAMATAN					32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sungai Beduk	100%	100 %	13.529.490.300	12.398.053.196	12.842.854.031	4.320.473.229,05	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100 %	549.962.300	444.272.300	169.549.000	- 380.413.300	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	34.984.000	1.692.000	846.000	-34.138.000	

7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	18.261.000	7.261.000	1.111.000	-17.002.000	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	11.394.000	11.394.000	10.807.000	-587.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	11.068.400	1.529.800	764.900	-10.303.500	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100 %	717.634.430	1.160.397.230	1.052.1363730	334.502.300	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.973.590	37.036.800	37.036.800	2.063.210	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	600.000,00	600.000,00	600.000	

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	552.901.500	179.093.500	179.093.500	-373.808.000	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	- Unit	0.00	0,00	0,00	0.00	
2	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-	1. 10%; 2. 100 %	11.627.554.249	11.863.002.707	9.688.249.168	3.691.350.848,50	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % , 100 %	10 %, 100 %	10.866.253.449	11.232.789.907	9.425.732.118	-1.440.521.331	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	21 Unit	2.644.239.400	2.838.031.909	2.536.589.629	-107.649.771	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas/Ormas	50 Pokmas / Ormas	123.600.000	123.600.000	57.158.590	-66.441.410	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	761.300.800	630.212.800	262.517.050	-498.783.750	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000	20.420.000	12.963.000	-17.037.000	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 keluarga	50 Keluarga	30.000.000	20.420.000	19.790.000	-19.790.000	

	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0 Keluarga	61.800.000,	25.190.000	0	-61.800.000	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	-	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	-	

	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000	20.420.000	0.00	-30.000.000	
						KELURAHAN TANJUNG PIAYU					35.950.413.94	34.500.108.303	32.044.253.699	-3.906.160.250	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.75	
	7	01				KECAMATAN					32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750	
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Tanjung Piayu	100 %	100 %	13.529.490.300	12.398.053.196	12.842.854.031	4.320.473.229,05	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100 %	549.962.300	444.272.300	169.549.000	-380.413.300	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	34.282.000	1.692.000	0.00	-34.282.000	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	18.948.000	7.490.000	3.160.000	-15.788.000	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	10.210.000	9.960.000	7.360.000	-2.850.000	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	11.068.500	3.714.500	1.303.250	-9.765.250	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100 %	717.634.430	1.160.397.230	1.052.136.730	334.502.300	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.680.800	39.680.800	39.680.800	0,00	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000	600.000,00	600.000,00	0.00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang	100%	100%	552.901.500	179.093.500	179.093.500	-373.808.000	

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	dipelihara dan berfungsi dengan baik								
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000		
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	10 %, 100 %	1. 10%; 2. 100 %	1.627.554.249	11.863.002.707	9.688.249.168	3.691.350.848,50		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % 100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	10.866.253.449	11.232.789.907	9.425.732.118	-1.440.521.331		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.250.100,	24.250.100	24.250.100	0.00		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	24 Unit	4.149.484.750	4.103.424.280	3.609.766.930	-539.717.820	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas/Ormas	100 Pokmas / Ormas	186.224.000	186.224.000	98.174.562	-88.049.438	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	761.300.800	630.212.800	262.517.050	-498.783.750	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 keluarga	50 keluarga	29.734.000	27.794.000	13.897.000	-15.837.000	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 keluarga	50 keluarga	30.404.000	28.464.000	14.355.500	-16.048.500	

	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	30.404.000	28.464.000	0,00	-30.404.000	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 keluarga	0	0	0	-	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	-	

	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	30.404.000	28.464.000	0.00	-30.404.000	
						KELURAHAN DURIANGKANG					35.950.413.949	34.500.108.303	32.044.253.699	-3.906.160.250	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750	
	7	01				KECAMATAN					32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Duriangkang	100 %	100 %	13.529.490.300	12.398.053.196	12.842.854.031	4.320.473.229,05	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100 %	549.962.300	444.272.300	169.549.000	-380.413.300	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.992.500,	2.356.600	0,00	-19.992.500	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	19.219.000	7.491.000	2.610.000	16.609.000	

	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	10.270.000	10.270.000	3.819.750	-6.450.250		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.068.500	11.068.500	11.068.500	0,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	717.634.430	1.160.397.230	1.052.136.730	334.502.300	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34.945.000	34.945.000	34.945.000	0,00		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	552.901.500	179.093.500	179.093.500	-373.808.000	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	11.627.554.249	11.863.002.707	9.688.249.168	3.691.350.848,50	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	1.10; 2. 100 %	1.10; 2. 100 %	10.866.253.449	11.232.789.907	9.425.732.118	-1.440.521.331	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.100	23.500.100	23.500.100	0.00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	22 Unit	3.491.233.400	3.633.637.719	2.812.417.839	-678.815.561	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	100 Pokmas /	100 Pokmas /	61.799.999	61.799.999	25.552.568	-36.247.431	

							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	Ormas					
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	761.300.800	630.212.800	262.517.050	-498.783.750	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	29.999.900	20.419.900	10.100.000	-19.899.900	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	29.999.900	20.419.900	10.100.000	-19.899.900	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber	50 Keluarga	0 Keluarga	30.900.000	29.582.000	0.00	-30.900.000	

								Berkualitas dan Berdaya Saing	Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0.00	
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya										
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0.00	
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup										
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarga	29.999.900	20.419.900	0,00	-29.999.900	

						KELURAHAN MUKA KUNING						35.950.413.949	34.500.108.303	32.044.253.699	-3.906.160.250	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750	
	7	01				KECAMATAN						32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan Muka Kuning	-	100 %	13.529.490.300	12.398.053.196	12.842.854.031	4.320.473.229,05	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	549.962.300	444.272.300	169.549.000	-380.413.300	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	19.938.000	1.692.000	1.692.000	-18.246.000	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	22.190.000	7.460.000	4.094.600	-18.095.400	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	4.975.000	4.975.000	2.475.000	-2.500.000	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	0 Paket	11.068.400	3.902.000	0.00	-11.068.400	

							yang Disediakan	Penggandaan yang Disediakan								
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	717.634.430	1.160.397.230	1.052.136.730	334.502.300	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	34.400.000	34.400.000	34.400.000	0.00	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000	600.000,00	600.000,00	0.00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	-	552.901.500	179.093.500	179.093.500	-373.808.000	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	600.000	0,00	0,00	0.00	
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	11.627.554.249	11.863.002.707	9.688.249.168	3.691.350.848,50	

							berdaya	pemberdayaan masyarakat							
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	10 % 1.10; 2. 100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	10.866.253.449	11.232.789.907	9.425.732.118	-1.440.521.331
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan		18.321.800	18.321.800	18.321.800	0.00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0 unit		0.00	0.00	0.00	0.00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas		123.599.900	200.000.000	200.000.000	76.400.100
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan		Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	100 %	100 Persen	761.300.800	630.212.800	262.517.050	-498.783.750

						Kelurahan			Kelurahan yang terlaksana								
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000	20.520.000	9.120.000	20.880.000		
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000	20.520.000	10.270.000	-19.730.000		
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	30.000.000	20.520.000	0,00	-30.000.000		
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00		

							Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
	7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0 Keluarg	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	0 Keluarg	30.000.000	20.520.000	0,00	-30.000.000	

						KECAMATAN SUNGAI BEDUK					35.950.413.949	34.500.108.303	32.044.253.699	-3.906.160.250	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.408.712.400	3.230.506.400	3.290.392.900	-118.319.500	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					3.408.712.400	3.230.506.400	3.290.392.900	-118.319.500	
13	2	11	11			PROGRAM	Persentase pengangkutan	Volume sampah yang	8 % , 92 %	8 % , 92	3.408.712.400	3.230.506.400	3.290.392.900	-1.469.437.467,45	

						PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		sampah yang tidak tuntas	ditangani oleh Kecamatan		%					
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah		Persentase Pengangkutan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik	92 %	92 %	3.408.712.400	3.230.506.400	3.290.392.900	-118.319.500	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
								Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 unit	2 unit	584.040.000	584.040.000	584.040.000	-	
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan										
								Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	13728 Ton	13728 Ton	2.824.672.400	2.646.466.400	2.706.352.900	-118.319.500	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750	
	7	01				KECAMATAN						32.541.701.549	31.269.601.903	28.753.860.799	-3.787.840.750	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sungai Beduk 2. Nilai SAKIP	100%	100 %	13.529.490.300	12.398.053.196	12.842.854.031	4.320.473.229,05	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	11.560.134.070	10.600.447.166	11.405.357.801	-154.776.269	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	58 Orang/bulan	11.560.134.070	10.496.517.166	11.301.427.801	- 258.706.269	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	103.930.000	103.930.000	103.930.000	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	549.962.300	444.272.300	169.549.000	-380.413.300	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	15.010.000	10.762.000	5.381.000	-9.629.000	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	100.023.000	82.021.000	65.666.000	-34.357.000	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	88.030.000	18.368.000	11.050.000	76.980.000	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	49.190.000	45.425.000	36.340.000	-12.850.000	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0 Laporan	28.920.000	193.747.900	0,00	-28.920.000	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	148.858.000	13.843.000	36.717.000	-112.141.000	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	66.200.000	0,00	0,00	-66.200.000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	3 Unit	68.815.000	0,00	22.874.000	-45.941.000	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangumam Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana		0 Unit	0 Unit	13.843.000	13.843.000	13.843.000	0.00	

							dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	717.634.430	1.160.397.230	1.052.136.730	334.502.300
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	267.600.000	328.155.790	328.155.790	60.555.790
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	303.635.040	683.778.840	575.518.340	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	552.901.500	179.093.500	179.093.500	- 373.808.000
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	38.490.000	0.00	0	-38.490.000
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		26 Unit	26 Unit	134.713.500	158.783.500	158.783.500	24.070.000

							Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	31 Unit	33.780.000	20.310.000	20.310.000	-13.470.000	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	344.718.000	0,00	0,00	-344.718.000	
15	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	4.997.012.000	4.997.012.000	4.997.688.600	-2.194.932.501,10	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	4.997.012.000	4.997.012.000	4.997.688.600	676.600	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan	1 Laporan	305.012.000	305.012.000	272.844.600	-32.167.400	

							Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.692.000.000	4.692.000.000	4.724.844.000	32.844.000	
16	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10 % 2. 100%	1. 10%; 2. 100 %	11.627.554.249	11.863.002.707	9.688.249.168	3.691.350.848,50	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan PKK yang direncanakan dibagi jumlah kegiatan PKK yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	761.300.800	630.212.800	262.517.050	- 498.783.750	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.100	30.000.100	15.000.050	-15.000.050	
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	217.655.000	227.655.000	156.501.500	-61.153.500	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	100 %	100 %	2.387.645.000	2.011.534.000	1.225.069.000	-974.145.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	2.387.645.000	2.011.534.000	1.225.069.000	-1.162.576.000	

	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	0 Orang	545.822.000	506.842.000	0,00	-545.822.000	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1350 Orang	1350 Orang	1.440.065.000	1.383.615.000	1.103.992.000	-336.073.000	

	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	401.758.000	121.077.000	121.077.000	-280.681.000	
J U M L A H												35.950.413.949	34.500.108.303	32.044.253.699	-3.906.160.250	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait kewilayahan, Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

Permasalahan yang paling krusial saat ini adalah pengelolaan sampah yang belum tertangani secara maksimal. Sampah yang menumpuk di TPS, berserakan dilingkungan permukiman, serta lambatnya pengangkutan ke TPA telah menjadi keluhan masyarakat yang berulang. Berbagai factor mempengaruhi situasi ini, mulai dari keterbatasan jumlah bin container, tidak teraturnya jadwal pengangkutan oleh armada Dinas Lingkungan Hidup, hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Permasalahan ini tidak hanya menciptakan kondisi lingkungan yang tidak sehat, tetapi juga berdampak pada persepsi public terhadap efektivitas pelayanan pemerintah.

Selain itu, capaian kinerja pada program pemberdayaan masyarakat kelurahan juga menunjukkan angka yang rendah. Banyak kegiatan yang semestinya dapat meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan warga tidak dapat direalisasikan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya jumlah kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, yang seharusnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungan kelurahan secara langsung.

Masalah lainnya adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, yang disebabkan oleh Peraturan Walikota Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaanya belum diterbitkan. Selain itu,

penghapusan Tenaga Teknis di kelurahan juga menyulitkan proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas usulan kegiatan pembangunan kelurahan. Akibatnya, PPTK kesulitan menyusun dokumen perencanaan, dan proses pelaksanaan kegiatan ikut terhambat. Tanpa dukungan teknis yang memadai, perencanaan menjadi tidak optimal.

Ketiga permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja Kecamatan Sungai Beduk, yang harus segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis, koordinatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 102 Rambahir Perubahan Renja Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025 Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Kecamatan Sungai Beduk);.
2. Renja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

WALIKOTA BATAM



AMSAKUR ACHMAD